

**PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH YANG NYATA DAN
BERTANGGUNG JAWAB DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MALANG**

**(SUATU STUDI TENTANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
DITINJAU DARI SEGI KEUANGAN DAERAH)**

KK
Fis P 37/9
Set
P

SKRIPSI



OLEH :

MURNI SETIJAWAN

NPM : 079012908

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A**

Semester Genap Tahun 1998 / 1999

**PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH YANG NYATA DAN
BERTANGGUNG JAWAB DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MALANG**

**(SUATU STUDI TENTANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
DITINJAU DARI SEGI KEUANGAN DAERAH)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh
Gelara Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

OLEH :

MURNI SETIJAWAN

NPM : 079012906

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A**

Semester Genap Tahun 1998 / 1999

**PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH YANG NYATA DAN
BERTANGGUNG JAWAB DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MALANG
(SUATU STUDI TENTANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
DITINJAU DARI SEGI KEUANGAN DAERAH)**

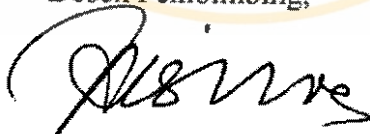
SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Murni Setijawan
079012906

Telah disetujui untuk diujikan,
Surabaya, 9 Juni 1999

Dosen Pembimbing,



Drs. Wisnu Pramutanto Pontjokaryono, Msi.
NIP. 131 937 851

**PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH YANG NYATA DAN
BERTANGGUNG JAWAB DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MALANG
(SUATU STUDI TENTANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
DITINJAU DARI SEGI KEUANGAN DAERAH)**

SKRIPSI

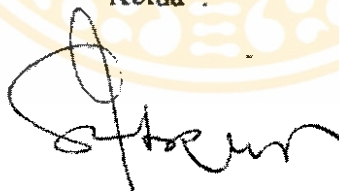
Oleh :

Murni Setijawan
079012906

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan komisi penguji
pada tanggal : 12 Juli 1999

Komisi Penguji ,

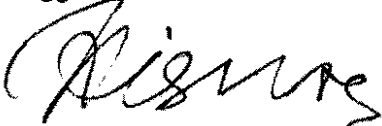
Ketua :



Drs. Sutrisno, MSi

NIP. 130 937 951

Anggota



Drs. Wisnu Pramutanto P, MSi.

NIP. 131 453 124

Anggota,



Drs. Haryadi, MSi.

NIP. 131 653 466

ABSTRAK SKRIPSI

Pembagian daerah di Indonesia yang berdasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan mengingat dan memandang dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak, asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa menyebabkan wilayah Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah administratif dan daerah-daerah otonom. Wilayah Administratif merupakan manifestasi pelaksanaan azas dekonsentrasi dibagi dalam propinsi atau ibukota negara, kabupaten atau kotamadya dan kecamatan. Sedangkan daerah otonom merupakan manifestasi pelaksanaan desentralisasi dan dibagi dalam daerah otonom tingkat I dan daerah otonom tingkat II.

Dalam penulisan skripsi ini, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui jumlah urusan otonomi daerah yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan daerah Tingkat II. Apakah dengan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada Kabupaten Tingkat II mampu mengelola keuangan daerahnya, serta kebijaksanaan – kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah daerah Tingkat II dalam melaksanakan urusan rumah tangganya dalam upaya penggalan dan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah.

Obyek dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penyelenggaraan urusan-urusan keuangan daerah yang diserahkan kepada pemerintah daerah, bagaimana intensifikasi penggalan sumber-sumber keuangan daerah dan pengelolaannya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang diberikan.

Lokasi dari penelitian ini adalah Daerah Tingkat II pada umumnya, tetapi penulis mengambil sampling di Daerah Tingkat II Kabupaten Malang.

Hasil daripada penelitian ini adalah dengan merujuk pada tujuan dari UU No. 5 Tahun 1974 dalam penciptaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab yaitu dengan adanya pemberian hak kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan sendiri, dengan membuat perencanaan dan menggali keuangan sendiri. Disamping itu ditemui adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam bantuan dana yang langsung turun dari pusat berupa proyek-proyek pembangunan, dimana perencanaan dan alokasi dana sudah ditentukan dari pusat dan daerah hanya berperan sebagai pelaksana dan pengawas dari proyek-proyek tersebut.

Saran yang dapat penulis berikan adalah dengan memberikan kekuasaan penuh kepada daerah untuk memaksimalkan organ-organ yang ada dalam pemerintahan daerah Tingkat II dan mengambil kebijakan yang diperlukan. Pemerintah pusat hanya sebagai penggerak dan pengawas dalam pelaksanaan otonomi daerah yang telah diberikan sehingga ketergantungan finansial daerah terhadap pusat dapat dikurangi sampai seminimal mungkin.